

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas tentang teori yang akan mendasari dari penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam bab ini juga akan mencantumkan studi empiris yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya.

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu Tenaga Kerja, Industri, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi dan Upah.

2.1.1. Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam artian mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan

yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Sumarsono, 2003: 5).

Di Indonesia, dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas maksimum. Pemilihan 10 tahun sebagai batas minimum berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk berumur muda yang sudah bekerja atau mencari kerja. Indonesia tidak menganut batas umur maksimum karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan dihari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya masih harus bekerja dan tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Simanjuntak, 1985: 2).

Dalam Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), tenaga kerja dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Tenaga kerja penuh (*full employment*)

Tenaga kerja penuh merupakan penduduk yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu.

b. Tenaga kerja sementara tidak bekerja

Tenaga kerja sementara tidak bekerja merupakan keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti hamil, cuti melahirkan, mogok dan sebagainya.

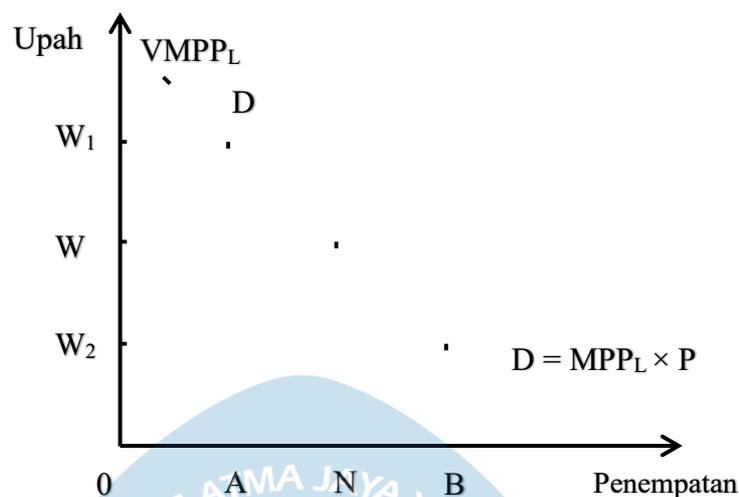
c. Tenaga kerja tidak penuh

Tenaga kerja tidak penuh merupakan seseorang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tenaga kerja tidak penuh sendiri terdiri dari:

- 1) Setengah penganggur yaitu seseorang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- 2) Pekerja paruh waktu yaitu seseorang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

2.1.1.1. Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1985), teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Permintaan tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang atau jasa karena barang tersebut memberikan kegunaan (*utility*) kepada pembeli. Namun bagi pengusaha, mempekerjakan seseorang bertujuan untuk membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, penambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari penambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksinya. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*).



Gambar 2.1
Fungsi Permintaan Terhadap Tenaga Kerja
 Sumber: Simanjuntak, 1985: 75.

Pada Gambar 2.1 di atas menjelaskan mengenai kurva permintaan tenaga kerja yang berslope negatif. Kurva permintaan tenaga kerja di atas menunjukkan hubungan antara besarnya tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Kurva di atas memiliki hubungan negatif, artinya semakin tinggi tingkat upah yang diminta maka akan mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta semakin rendah dan jumlah permintaan tenaga kerja akan meningkat. Garis DD menggambarkan besarnya nilai hasil marjinal tenaga kerja (*value marginal physical product of labor VMPP_L*) untuk setiap tingkat penempatan. Jika jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak $OA = 100$ orang, maka nilai hasil kerja orang yang ke-100 dinamakan $VMPP_L$ dan besarnya sama dengan $MPP_L \times P = W_1$. Nilai ini lebih besar dari tingkat upah yang sedang berlaku (W). Oleh karena itu, laba pengusaha dapat bertambah dengan menambah tenaga kerja baru. Pengusaha dapat terus menambah laba dengan mempekerjakan orang hingga ON . Di titik N pengusaha mencapai laba

maksimum dan nilai $MPP_L \times P$ sama dengan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja (Simanjuntak, 1985: 76).

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Konsumen membeli barang karena barang tersebut memberikan kepuasan (*utility*) kepada konsumen. Namun pengusaha mempekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen (Sumarsono, 2011: 70).

Menurut Sumarsono (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah :

a. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila menggunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal seperti berikut:

- 1) Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

2) Apabila upah naik dengan asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah, maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

b. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen

Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

c. Harga barang modal turun

Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada kondisi ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja juga meningkat.

2.1.1.2. Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga

kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal.
2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
3. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi.
4. Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya.

Pertama, semakin kecil kemungkinan mensubstitusikan modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga kerja. Ini juga tergantung dari teknologi. Bila suatu teknik produksi menggunakan modal dan tenaga kerja dalam perbandingan yang tetap maka perubahan tingkat upah tidak mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja paling sedikit dalam jangka pendek. Elastisitas akan semakin kecil bila keahlian atau keterampilan golongan tenaga kerja semakin tinggi dan semakin khusus.

Kedua, membebankan kenaikan tingkat upah kepada konsumen dengan menaikkan harga jual barang hasil produksi. Kenaikan harga jual ini menurunkan jumlah permintaan konsumen akan hasil produksi. Selanjutnya turunnya permintaan konsumen terhadap hasil produksi mengakibatkan penurunan dalam

jumlah permintaan tenaga kerja. Semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi maka semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerja.

Ketiga, elastisitas permintaan akan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya karyawan terhadap biaya produksi secara keseluruhan juga besar.

Keempat, elastisitas permintaan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan bahan-bahan pelengkap dalam produksi seperti modal, tenaga listrik, bahan mentah, dan lain-lain (Simanjuntak, 1985: 77-78).

2.1.2. Industri

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2017), industri adalah suatu unit atau kesatuan produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan mengubah bahan baku dengan mesin kimia atau dengan tangan menjadi produk baru, atau mengubah barang-barang yang kurang bernilai menjadi barang yang bernilai dengan maksud mendekatkan produk tersebut pada konsumen akhir. Menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Dumairy (1996: 227) menyatakan industri memiliki dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan yang sejenis, misalnya industri kosmetika yang berarti dalam hal ini diartikan sebagai himpunan perusahaan penghasil produk kosmetika. Kedua, industri merupakan suatu sektor ekonomi

yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif seperti mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi.

Berdasarkan pengertian industri di atas, dapat disimpulkan bahwa industri merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting karena dapat menghasilkan kebutuhan masyarakat.

2.1.2.1. Klasifikasi Industri

Semakin maju perindustrian di suatu negara atau daerah, maka semakin banyak jumlah industri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah industri digolongkan menjadi beberapa jenis industri, yaitu sebagai berikut :

1. Klasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Baku

Berdasarkan bahan baku, industri dibedakan menjadi :

a. Industri ekstraktif

Industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam.

Contoh : bahan baku yang dihasilkan dari pertambangan, pertanian, perikanan dan lain-lain.

b. Industri non-ekstraktif

Industri yang mengolah lebih lanjut hasil dari industri lain.

Contoh : kain

c. Industri fasilitatif

Industri yang memberikan produk berupa jasa yang dijual kepada para konsumen.

Contoh : perbankan, transportasi, dan lain-lain.

2. Klasifikasi Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dibedakan menjadi :

a. Industri rumah tangga

Industri yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 – 4 orang

Contoh : industri kerajinan dan industri makanan ringan.

b. Industri kecil

Industri yang jumlah tenaganya antara 5 – 19 orang

Contoh : industri batubata dan industri pengolahan rotan.

c. Industri sedang atau menengah

Industri yang jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang

Contoh : industri keramik dan industri bordir.

d. Industri besar

Industri yang jumlah tenaga kerjanya paling banyak, yaitu antara 100 atau lebih

Contoh : industri tekstil dan industri mobil.

3. Klasifikasi Industri Berdasarkan Produk Yang Dihasilkan

Berdasarkan produk yang dihasilkan, industri dibedakan menjadi :

a. Industri primer

Industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan yang lebih lanjut. Barang yang dihasilkan dari sektor industri primer dapat digunakan secara langsung.

Contoh : industri makanan dan minuman, industri anyaman, dan lain-lain.

b. Industri sekunder

Industri yang menghasilkan barang atau benda yang perlu diolah lebih lanjut sebelum dapat digunakan secara langsung.

Contoh : industri tekstil, industri pemintalan benang, dan lain-lain

c. Industri tersier

Industri yang tidak menghasilkan barang atau benda yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Namun menghasilkan jasa layanan yang dapat membantu dan mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Contoh : industri pariwisata, industri perdagangan, dan lain-lain.

4. Klasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Mentah

Berdasarkan bahan mentah, industri dibedakan menjadi :

a. Industri pertanian

Industri yang mengolah bahan mentah dari hasil pertanian.

Contoh : industri kopi, industri minyak goreng, dan lain-lain.

b. Industri pertambangan

Industri yang mengolah bahan mentah dari hasil pertambangan yang akan menjadi barang siap konsumsi.

Contoh : industri baja, industri semen, industri bahan bakar minyak, dan lain-lain.

c. Industri jasa

Industri yang mengolah jasa layanan yang mempermudah dan meringankan beban masyarakat dan dapat menghasilkan keuntungan.

Contoh : industri seni dan hiburan, industri pariwisata, industri perbankan, dan lain-lain.

5. Klasifikasi Industri Berdasarkan Proses Produksi

Berdasarkan proses produksi, industri dibagi menjadi :

a. Industri hulu

Industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi sehingga tidak menghasilkan barang yang dapat dikonsumsi secara langsung.

Contoh : industri aluminium

b. Industri hilir

Industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi atau barang yang langsung dikonsumsi.

Contoh : Industri otomotif

6. Klasifikasi Industri Berdasarkan Barang yang Dihasilkan

Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dibagi menjadi :

a. Industri berat

Industri yang menghasilkan mesin atau alat-alat yang dapat digunakan untuk produksi lainnya.

Contoh : industri alat-alat berat

b. Industri ringan

Industri yang menghasilkan barang yang siap untuk dikonsumsi.

Contoh : industri makanan dan minuman

7. Klasifikasi Industri Berdasarkan Lokasi Unit Usaha

Berdasarkan lokasi pada unit usaha, industri dibedakan menjadi :

- a. Industri berorientasi pada pasar (*Market Oriented Industry*)
Industri yang didirikan sesuai dengan lokasi penyebaran konsumen.
- b. Industri berorientasi pada tenaga kerja (*Man Power Oriented Industry*)
Industri yang didirikan sesuai dengan lokasi yang terdapat banyak tenaga kerja tetapi tingkat pendidikannya masih rendah.
- c. Industri berorientasi pada bahan baku (*Supply Oriented Industry*)
Industri yang didirikan sesuai dengan lokasi adanya bahan baku untuk memotong atau mengurangi biaya transportasi yang besar.

8. Klasifikasi Industri Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan perdagangan, industri dibagi menjadi :

- a. Industri Kimia Dasar
Industri yang memerlukan modal yang cukup besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju.
- b. Industri Mesin Logam Dasar
Industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin berat atau perakitan.
- c. Aneka Industri
Industri yang menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup.

d. Industri Kecil

Industri yang bergerak dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit dan menggunakan teknologi sederhana.

Contoh : industri perabotan rumah tangga

e. Industri Pariwisata

Industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata.

Contoh : wisata alam.

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (Bank Indonesia, 2015).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi

di suatu daerah selama satu periode tertentu atau sebagai jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu. PDRB dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit produksi dalam penyajian ini dibagi menjadi 9 lapangan usaha (sektor), yaitu :

- 1) Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam

jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB juga mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan semua komponen pengeluaran akhir, yaitu :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Lembaga swasta nirlaba
- 2) Pengeluaran konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) Perubahan inventori
- 5) Ekspor neto (ekspor dikurangi impor) dalam waktu tertentu.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk, yaitu :

a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan merupakan jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi (BPS, 2012: 26 – 27).

2.1.4. Investasi

Menurut Sukirno (2008: 121), investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan investor atau penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Menurut Dumairy (1996: 81), investasi adalah penambahan barang modal secara netto positif. Seseorang yang membeli barang modal tetapi ditunjukkan untuk mengganti barang modal yang aus dalam proses produksi bukanlah merupakan investasi, tetapi disebut dengan pembelian barang modal untuk mengganti (*replacement*). Pembelian barang modal ini merupakan investasi yang akan datang.

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam

perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing.

Secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu:

a. Investasi yang terdorong (*Induced Investment*)

Investasi yang tidak diadakan akibat adanya penambahan permintaan, penambahan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan. Apabila pendapatan bertambah, maka tambahan permintaan akan digunakan untuk konsumsi, sedangkan penambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. Sudah pasti apabila ada tambahan permintaan, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut.

b. Investasi Otonom (*Otonomous Investment*)

Investasi yang dilaksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang diadakan bukan karena pertumbuhan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Sukirno, 2004: 108).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997, tujuan penyelenggaraan investasi atau penanaman modal yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Menciptakan lapangan kerja

- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi dalam suatu perekonomian yaitu:

- 1) Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh di masa depan

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang kelihatannya mempunyai prospek yang baik dan dapat dilaksanakannya, dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Semakin baik keadaan masa depan, semakin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh pengusaha. Oleh sebab itu, mereka akan lebih terdorong untuk melaksanakan investasi yang telah atau sedang direncanakan

- 2) Kemajuan teknologi

Pada umumnya semakin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, semakin banyak pula kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh

para pengusaha. Untuk melaksanakan pembaruan-pembaruan, para pengusaha harus membeli barang-barang modal yang baru., para pengusaha harus membeli barang-barang modal yang baru, dan adakalanya juga harus mendirikan bangunan-bangunan pabrik atau industri yang baru. Maka semakin banyak pembaruan yang akan dilakukan, semakin tinggi tingkat investasi yang akan tercapai

3) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya

Dalam analisis mengenai penentuan pendapatan nasional pada umumnya dianggap investasi yang dilakukan para pengusaha adalah berbentuk investasi otonomi. Walau bagaimanapun, pengaruh pendapatan nasional kepada investasi tidak boleh diabaikan. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan perkataan lain, apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula

4) Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan

Ketika perusahaan mengalami peningkatan keuntungan, pada umumnya keuntungan yang diperoleh tersebut akan disalurkan untuk meningkatkan produksi. Dengan kata lain, akan meningkatkan investasi perusahaan tersebut. Adanya peningkatan keuntungan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk lebih meningkatkan keuntungannya lagi di masa

depan sehingga perusahaan meningkatkan tingkat investasinya guna mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan lebih besar (Sukirno, 1996: 76).

Jenis investasi atau penanaman modal dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut:

a. Investasi Dalam Negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) tentang Penanaman Modal (UUPM), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan adalah dapat berbentuk perseroan terbatas (PT).

Berdasarkan UUPM Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Investasi Asing atau Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal asing (PMA) adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan UUPM Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

2.1.5. Upah

Menurut Sumarsono (2003), upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Teori yang mendasari sistem pengupahan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Upah Menurut Kebutuhan

Ajaran Karl Marx pada dasarnya berpusat pada tiga hal, yaitu:

- a) Teori Nilai

Karl Marx berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Jadi nilai suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Implikasi pandangan yang demikian adalah harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi tersebut; jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksi suatu jenis barang adalah kira-kira sama. Oleh sebab itu harga di beberapa tempat menjadi relatif sama; seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh, jadi dengan demikian hanya buruh/pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut.

b) Teori Pertentangan Kelas

Karl Marx berpendapat bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian akan menimbulkan pengangguran besar-besaran. Dengan adanya pengangguran ini maka pengusaha dapat menekan upah.

c) Terbentuknya Masyarakat Komunis

Teori nilai dan pertentangan kelas dari pemikiran Karl Marx menyebabkan terbentuknya masyarakat komunis. Dalam masyarakat ini seseorang tidak menjualkan tenaganya kepada yang lain, namun masyarakat ini melalui partai buruh akan mengatur apa dan berapa jumlah produksi. Dalam masyarakat impian Marx “tiap orang harus bekerja menurut kemampuannya, dan tiap orang memperoleh menurut kebutuhannya”.

Dampak dari pemikiran Karl Marx yaitu:

- (i) kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang macam dan jumlahnya kira-kira sama. Nilai setiap barang yang sama (walaupun berbeda tempat) adalah sama. Oleh sebab itu, upah tiap-tiap orang juga relatif sama. Dalam hal ini sistem upah hanya sekedar menjalankan fungsi sosial, yaitu memenuhi kebutuhan konsumtif dari buruh.
- (ii) sistem pengupahan disini tidak mempunyai fungsi pemberian insentif yang sangat perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
- (iii) sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang yang benar-benar mau bekerja menurut kemampuannya. Ini merupakan sentralisasi kekuasaan dan sistem paksaan, yang dipandang bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan.

2. Upah Sebagai Imbalan (Teori Pertambahan Produk Marjinal)

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima

orang tersebut. Dengan kata lain tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha adalah:

$$W = VMPP_L = MPP_L \times P \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

W = tingkat upah (*labor cost*) yang dibayarkan pengusaha kepada karyawan

P = harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang

MPP_L = pertambahan hasil marjinal pekerja (*Marginal Physical Product of Labor*), diukur dalam unit barang per unit waktu

VMPP_L = nilai pertambahan hasil marjinal karyawan (*Value of Marginal Physical Product of Labor*).

Nilai pertambahan hasil marjinal karyawan VMPP_L, merupakan nilai jasa yang diberikan oleh karyawan kepada pengusaha. Setidaknya upah, W, dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan terhadap jasa karyawan yang diberikan kepada pengusaha.

Selama nilai pertambahan hasil marjinal karyawan lebih besar dari upah yang dibayarkan oleh pengusaha ($VMPP_L > W$), pengusaha dapat menambah keuntungan dengan menambah pekerja. Disisi lain, pengusaha tentu tidak bersedia membayar upah yang lebih besar dari nilai usaha kerja yang diberikan karyawan kepada pengusaha. Dilihat dari segi pekerja, pekerja tidak bersedia menerima upah yang lebih rendah dari nilai usaha kerjanya. Bila pengusaha tertentu membayar upah yang lebih rendah dari nilai usaha pekerja, maka pekerja akan mencari pekerjaan lainnya yang lebih mampu membayar nilai usaha kerjanya. Dengan kata

lain, dengan asumsi adanya mobilitas sempurna pekerja akan memperoleh upah senilai pertambahan hasil marginalnya sebagaimana dinyatakan dalam persamaan (2.1).

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Teori Neo Klasik, karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Dengan kata lain, upah dalam hal ini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha (Simanjuntak, 1985: 106-108).

Upah yang diterima para pekerja dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Upah nominal (upah uang) adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
2. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja (Sukirno, 2005: 351).

Komponen-komponen yang terdapat dalam penghasilan upah berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/MEN/1990, sebagai berikut:

a. Upah Pokok

Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama, dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Istri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Jabatan dan lain-lain.

c. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan ini merupakan suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja atau buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja atau buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, misalnya seperti Tunjangan Transport yang diberikan berdasarkan kehadiran.

Penghasilan non upah, sebagai berikut:

a. Fasilitas

Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh, contohnya seperti fasilitas kendaraan; pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah, kantin dan lain-lain.

b. Bonus

Bonus adalah bukan bagian dari upah, tetapi pembayaran yang diterima oleh pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja yang lebih besar dari target produksi yang normal atau karena

peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.

c. Tunjangan Hari Raya (THR)

Gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.

Upah yang terus meningkat secara langsung dapat membawa dampak yang signifikan pada penawaran tenaga kerja, karena dengan adanya tingkat upah yang dinaikkan tersebut para pengusaha akan berupaya untuk meningkatkan atau menambah jumlah unit usahanya sehingga dengan adanya penambahan unit usaha, pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerjanya. Apabila menggunakan asumsi bahwa tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala atau *scale effect*. Apabila upah naik (dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tidak berubah) maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain, penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya

pergantian/penambahan penggunaan mesin disebut efek substitusi (Sumarsono, 2003: 106).

2.1.5.1. Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum menyatakan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jarring pengaman. Nilai ini wajib menjadi acuan utama pengusaha dan pelaku industri sebagai standar minimal dalam memberikan upah karyawan yang dimilikinya.

Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum Regional, Sektor Regional maupun Sub Sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Upah pokok minimum diatur secara minimal. Dalam peraturan pemerintah diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan (Sumarsono, 2003: 141).

Ada beberapa jenis upah minimum menurut UU Pengupahan No. 78 Tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

a. Upah Minimum Provinsi

Upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota. Penetapan upah minimum ini dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi.

c. Upah Minimum Sektoral Provinsi

Upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.

d. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota

Upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota.

2.2. Studi Terkait

Pramusinto dan Daerobi (2020) menganalisis tentang *Labor Absorption of The Manufacturing Industry Sector in Indonesia*. Data yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2010-2017) dan *cross section* (34 provinsi). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. Model yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan pendekatan *Random Effect Model (REM)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen jumlah perusahaan industri, PDRB dan teknologi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja. Variabel independen upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja. Disisi lain, variabel independen nilai investasi dan pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Nurulaini *et al* (2015) menganalisis tentang Pengaruh Tingkat Upah dan Nilai Output Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Skala Besar dan Sedang di Indonesia 2000-2013. Data yang digunakan berbentuk data panel yaitu data *time series* dan data *cross section*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan regresi data panel dengan metode analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini diperoleh Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel nilai output berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Susilowati dan Wahyuni (2019) menganalisis tentang Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Industri di Indonesia. Data yang digunakan yaitu data panel gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Maka penelitian ini menggunakan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Budiarto dan Dewi (2015) menganalisis tentang Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu data antara *time series* dan *cross section*. Jenis data yang digunakan data sekunder

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi-instansi terkait. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi dan upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan PDRB dan upah minimum provinsi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi.

Kamar (2017) menganalisis tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2009-2015. Data yang digunakan adalah *time series*, adapun data yang diambil yaitu tahun 2009-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Tangerang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.1
Hasil Studi Terkait

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Pramusinto dan Daerobi (2020)	<i>Labor Absorption of The Manufacturing Industry Sector in Indonesia</i>	1).Penyerapan tenaga kerja 2).Jumlah perusahaan industri 3). PDRB 4).Nilai investasi 5). Upah buruh 6). Pendidikan 7). Teknologi	Metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program <i>E-views</i>	Jumlah perusahaan industri, PDRB dan teknologi secara parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai investasi dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
2.	Nurulaini <i>et al.</i> (2015)	Pengaruh Tingkat Upah dan Nilai Output Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Skala Besar dan Sedang di Indonesia Tahun 2000-2003	1). Penyerapan Tenaga Kerja 2). Tingkat Upah 3). Nilai Output	Metode analisis regresi linear berganda	Tingkat upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai output berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

3.	Susilowati dan Wahyuni (2019)	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Industri di Indonesia	1) Penyerapan Tenaga Kerja 2) Angkatan Kerja 3) Upah Minimum	Metode analisis regresi linear berganda	Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
4.	Budiarto dan Dewi (2015)	Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali	1) PDRB 2) Upah Minimum Provinsi 3) Penyerapan Tenaga Kerja 4) Investasi	Metode Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	PDRB berpengaruh positif terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi dan upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan PDRB dan upah minimum provinsi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi.

5.	Kamar (2017)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2009-2015	1) Penyerapan Tenaga Kerja 2) Pertumbuhan Ekonomi 3) Investasi	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
----	--------------	--	--	---	--

